BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dan keterlibatan orang lain untuk kelangsungan hidupnya.¹ Manusia memiliki aturan dalam memilih dan menjalani kehidupan bersama pasangan, termasuk aspek agama, adat istiadat, dan norma sosial. Masyarakat Indonesia sangat mematuhi tradisi adat dalam pelaksanaan pernikahan karena pengaruh dinamisme, animisme, dan Agama Hindu yang pernah dianut oleh nenek moyang.

Hukum Islam memberikan pedoman tentang perilaku individu dan tatanan sosial yang adil dan seimbang berdasarkan ajaran agama Islam. Namun, hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang berbeda. Keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Eksistensi hukum sangat membutuhkan keberadaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan masyarakat membutuhkan hukum agar tercipta tata kehidupan yang baik dan tertib. Tetapi tidak jarang perilaku sosial individu sering berubah dan tidak sesuai dengan hukum yang ada.² Upaya untuk memahami

¹ Jozef Glinka Svd, *Manusia Makhluk Sosial Biologis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 2

² Mushafi dan Ismail Mrzuku, "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Cakrawala hukum* 9, no.1 (Juni 1, 2018) : 50-58

perilaku sosial manusia dan dinamika masyarakat yaitu dengan teori sosiologi hukum Islam melalui berbagai pendekatan konseptual.

Termasuk di daerah Madura, kebudayaan yang sangat terkenal menonjolkan ciri khas akulturasi keislaman yang telah meresap secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep masih terdapat tradisi atau kepercayaan yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, salah satunya adalah bulan *'Takepe'*, yaitu bulan Dzulqa'dah dalam kalender Hijriyah. Menurut kepercayaan ini, melangsungkan pernikahan pada bulan *'Takepe'* dianggap membawa sial, seperti rezeki yang sulit mengalir dan kesulitan mendapatkan keturunan, karena bulan ini dianggap sebagai bulan angker.³ Di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep mayoritas masyarakat mematuhi tradisi larangan menikah pada bulan yang berada di antara dua hari raya (Idul Fitri/Syawal dan Idhul Adha/Dzulhijjah), lebih dikenal sebagai Bulan *'Takepe'* atau Dzulqa'dah dalam kalender Hijriyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa GulukGuluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep , Bapak Wail, menyatakan bahwa menikah di bulan *'Takepe'* adalah sebuah tradisi masyarakat setempat yang dilarang untuk dilakukan karena merupakan bagian dari tradisi turun-temurun. Tradisi ini mengajarkan untuk berprihatin kepada para aulia, yang

³ Wilda Fauzan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'urf,'" *Sakina : Journal Of Family Studies* 3, no.4 (Desember 29,2019), <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jfs/article/view/339>

dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Seseorang yang melanggar tradisi ini akan menjadi perbincangan di masyarakat.⁴

Wawancara selanjutnya dengan K.H Widadi Rahim selaku Ketua MWC NU Kecamatan Guluk-Guluk, mengungkapkan bahwa menikah di bulan *Takepe'* tidak dilarang dalam Islam. Bulan *Takepe'* dianggap sebagai bulan mulia, di mana kebaikan dilakukan akan dilipatgandakan pahalanya. Melakukan pernikahan di bulan ini dipandang baik karena dihormati dalam agama. Namun, menghindari pernikahan di bulan *Takepe'* juga diperbolehkan karena telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Penting untuk tidak percaya bahwa bulan tersebut membawa kesialan, karena hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kesyirikan.⁵

Kasus larangan menikah pada bulan *Takepe'* di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep merupakan representasi dari kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosiologi hukum Islam. Tradisi ini mencerminkan bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan kepercayaan tradisional dapat memengaruhi keputusan pernikahan di masyarakat Madura. Larangan menikah pada bulan *Takepe'* menggambarkan peran yang penting dari adat istiadat lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk norma-norma pernikahan. Hal ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana adat dan agama saling berinteraksi, apakah terdapat konflik atau keselarasan antara nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip Islam terkait pernikahan. Sosiologi hukum Islam juga dapat mengeksplorasi

⁴ Bapak Wail, Kepala Desa Di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung*, 18 Desember 2023.

⁵ K.H Widadi Rahim, selaku Ketua MWC NU Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung*, 12 Januari 2024.

dampak sosial dan hukum dari larangan ini. Bagaimana larangan ini memengaruhi keputusan terkait kebebasan menikah di bulan-bulan tertentu.⁶

Dalam konteks sosiologi, larangan ini mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya, serta kepercayaan tradisional, mempengaruhi keputusan pernikahan di masyarakat. Faktor adat, agama, dan finansial ikut memainkan peran penting dalam menjaga tradisi ini. Hubungan antara sosiologi hukum dan pernikahan di bulan *Takepe'* dapat dipahami melalui kajian tentang bagaimana norma-norma sosial dan budaya di masyarakat, seperti larangan menikah pada bulan tersebut, memengaruhi sistem hukum dan kehidupan sosial.⁷

Dalam konteks bulan Dzulqo'dah, yang merupakan salah satu bulan dalam kalender Islam, para sosiolog dapat mengamati berbagai fenomena sosial yang terjadi selama bulan ini dan menganalisisnya dengan menggunakan teori perilaku sosial. Misalnya, selama bulan Dzulqo'dah, masyarakat Muslim mungkin terlibat dalam persiapan untuk ibadah haji yang akan dilaksanakan selama bulan Dzulhijjah. Sosiolog dapat memeriksa bagaimana persiapan ini mempengaruhi dinamika sosial di dalam komunitas, seperti perubahan dalam interaksi sosial, perasaan identitas keagamaan, atau pola konsumsi dan distribusi sumber daya ekonomi.

Larangan menikah pada bulan *Takepe'* mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya, serta kepercayaan tradisional, memengaruhi keputusan pernikahan di masyarakat Madura. Sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana tradisi, norma sosial, dan agama saling

⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publihing, 2020), 29

⁷ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 63

memengaruhi dalam pembentukan keputusan pernikahan. Penelitian sebelumnya telah mengangkat topik sejenis, tetapi penelitian ini akan fokus pada praktik larangan menikah di bulan *Takepe*’ dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara tradisi lokal, norma sosial, kepercayaan, dan hukum Islam dalam konteks pernikahan di masyarakat Madura khususnya di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep terkait larangan menikah pada bulan *Takepe*’.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Larangan Menikah di Bulan *Takepe*’ Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi Larangan Menikah di Bulan *Takepe*’ di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan *Takepe*’ di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Larangan Menikah di Bulan *Takepe*’ di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

2. Untuk menganalisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Larangan Menikah di Bulan *Takepe'* di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Larangan Menikah di Bulan *Takepe'* di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep memiliki manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kajian sosiologi hukum Islam terkait praktik larangan menikah di bulan *Takepe'* di wilayah tersebut.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang melandasi praktik larangan menikah dalam konteks lokal tersebut.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai praktik-praktik sosial dan hukum Islam di wilayah yang serupa.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam memahami serta mengimplementasikan konsep-konsep sosiologi hukum Islam dalam konteks praktik menikah di masyarakat.

- b. Bagi IAIN Madura, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut mengenai aspek-aspek sosial dan hukum Islam

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.⁸

2. Tradisi/adat

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.⁹

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum islam dengan pola perilaku masyarakat, dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Sehingga yang

⁸ Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Perspektif 'Urf," Sakina: Jurnal of Family Studies, Volume 3 (2019)
<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6571/>

⁹ Poerwardaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 158.

dikatakan perspektif Sosiologi Hukum Islam adalah pandangan seseorang mengenai suatu masalah tertentu berdasarkan hubungan hukum Islam dengan perilaku masyarakat.¹⁰

¹⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publihing, 2020), 30